

THE DEVELOPMENT OF EDUCATION IN PONOROGO IN 1900-1942

Weny Dwi Setyowati
(1240114012 0)

Abstract

During the Dutch colonial government, the Dutch language became one of the requirements for one to get a job in an office or a company. The reading, writing, and arithmetic abilities in the Dutch language could be acquired through education. The education implementation was started by the Dutch colonial government. The educational system was known as the western or modern educational system. Ponorogo was one of the regions where such an educational system was implemented. Before modern education was implemented, in Ponorogo there had been a traditional educational system or *pesantren* (Islamic boarding school). In its development, private institutions also took part in the education implementation in Ponorogo. This study aimed to investigate the activities of *pesantren*, the Dutch colonial government, and private institutions in the education implementation in Ponorogo.

The research findings showed that in addition to traditional education, modern education was also implemented in Ponorogo by the Dutch colonial government. However, the education implementation was limited for the elite group. The common people could attend only the low level school such as *Sekolah Desa* (school for villagers). In its development, the modern education implementation was imitated by movement organizations in Ponorogo. Education implemented in Ponorogo had impacts such as the emergence of *santri* (true Muslim) and *abangan* (nominal Muslim) groups, the establishment of movement organizations, and the emergence of high officials and common (uneducated) people. Education implemented in Ponorogo finally improved the intelligence and religiosity of people in Ponorogo.

Keywords: *Education, Development, Ponorogo.*

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI PONOROGO TAHUN 1900-1942

Oleh:

Weny Dwi Setyowati
(12407141020)

Abstrak

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, bahasa Belanda menjadi salah satu syarat untuk mendapat pekerjaan di kantor maupun perusahaan. Kemampuan membaca, menulis dan berhitung dalam bahasa Belanda bisa di dapat lewat pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan tersebut mulai dilakukan oleh pemerintah Belanda di Hindia Belanda. Sistem pendidikan yang diselenggarakan dikenal dengan sistem pendidikan barat atau modern. Ponorogo merupakan salah satu wilayah di yang juga mendapat penyelenggaraan pendidikan tersebut. Sebelum pendidikan modern diselenggarakan, di Ponorogo sudah terdapat sistem pendidikan tradisional atau pesantren. Pada perkembangannya, pihak swasta juga ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan di Ponorogo. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui aktivitas pesantren, pemerintah Belanda, dan pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di Ponorogo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selain terdapat pendidikan tradisional, Ponorogo juga menjadi tempat untuk penyelenggaraan pendidikan modern yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Akan tetapi, penyelenggaraan pendidikan hanya terbatas bagi golongan elite. Golongan rakyat biasa pada umumnya hanya dapat sekolah di sekolah rendah, misalnya Sekolah Desa. Pada perkembangannya, penyelenggaraan pendidikan modern tersebut ditiru oleh organisasi pergerakan di Ponorogo. Pendidikan yang berlangsung di Ponorogo menimbulkan dampak seperti munculnya golongan santri dan abangan, terbentuknya organisasi pergerakan, memunculkan golongan pejabat tinggi dan rakyat biasa (tidak terpelajar). Pendidikan yang berlangsung di Ponorogo pada akhirnya meningkatkan kecerdasan dan kereligiusan masyarakat Ponorogo.

Kata Kunci: *Pendidikan, Perkembangan, Ponorogo.*

A. Pendahuluan

Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) merupakan kongsi dagang yang datang ke Hindia Belanda awal abad ke-17. Setelah VOC mengalami kebangkrutan tahun 1789, Hindia Belanda menjadi jajahan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda saat itu tetap mengutamakan perdagangan dan menjadikan pribumi sebagai pekerja pemerintahan dengan upah rendah. Untuk

menunjang kepentingan perusahaan, pemerintah mendirikan sekolah-sekolah agar pribumi dapat membaca dan menulis huruf Latin.

Tujuan Pemerintah Belanda mendirikan sekolah bagi pribumi karena sampai awal abad XX masyarakat pribumi pada umumnya masih buta huruf Latin. Mereka hanya mengenal huruf Arab Al-Quran, huruf Melayu, atau huruf daerah. Keadaan ini merupakan dampak kuatnya pengaruh ulama dan pesantren. Pesantren mengajarkan perjuangan Islam sebagai simbol gerakan nasional yang menimbulkan integrasi dan meniadakan rasa etnoregional. Pesantren mengubah jiwa sukuisme atau rasismemenjadi nasionalisme. Ulama berperan sebagaipembina pesantren serta memfungsikan pesantrennya sebagai lembaga pendidikan agama yang berperan serta dalam membangun *character and national building*.¹

Keuletan ulama dan santri dalam lembaga pendidikan Islam dianggap pemerintah Belanda sebagai bentuk perlawanan. Hal ini didasarkan ulama dan santri saat itu dianggap sebagai kelompok intelektual yang mampu memberikan bimbingan terhadap pribumi yang sedang ditindas oleh penjajah Belanda. Penindasan yang dilakukan oleh penjajah Belanda tersebut disadarkan dengan kritik yang dilakukan oleh Conrad Th. Van Deventer dalam majalah *De Gids* tahun 1899 dengan judul *De Eereschuld-A Debt of Honour* (Utang Kehormatan),² yang menuliskan kemakmuran yang diperoleh Belanda merupakan jasa dari pribumi. Belanda sebagai kerajaan yang maju dan bermoral haruslah membayar hutang itu dengan menyelenggarakan trilogi atau trias yang kemudian dikenal dengan politik etis. Politik etis difokuskan pada bidang irigasi, emigrasi (transmigrasi), dan edukasi.³ Politik etis menandai perubahan sikap pemerintah

¹ Ahmad Mansyur Suryanegara, *Api Sejarah*, (Bandung: Salamandani Pustaka Semesta, 2009), hlm. 301.

²*Ibid.*, hlm. 302.

³Daliman, A, *Sejarah Hindia Belanda Abad XIX-Awal Abad XX*, (Yogyakarta:Ombak, 2012),hlm. 39.

Belanda untuk mulai memperhatikan kesejahteraan rakyat pribumidengan memikirkan sekolah rakyat, kesehatan rakyat dan industri.⁴

Untuk merealisasikan politik etis dalam bidang pendidikan, pemerintah Belandamendirikan sekolah bagi pribumi.Pendidikan yang diberikan oleh pemerintah Belanda ialah pendidikan tingkat rendah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan seperti mandor-mandor atau pelayan-pelayan perusahaan.⁵ Pengajaran yang diberikan di sekolah seperti membaca, menulis, berhitung⁶, ilmu bumi, ilmu alam, sejarah dan menggambar. Pemerintah Belanda menyelenggarakan pendidikan karena takut kritik dan takut jika tetap memberikan penderitaan pada pribumi akan memicu timbulnya perlawanan rakyat secara meluas atau terus-menerus.⁷

Sejak politik etis diterapkan, pendidikan di Hindia Belanda mengalami kemajuan yang lebih pesatdan tidak terbatas hanya ditujukan secara eksklusif bagi kelompok-kelompok terpilih menurut ukuran Belanda. Atas perintah Gubernur Jendral Heutsz pendidikan mulai diselenggarakan bagi masyarakat yang lebih luas dalam bentuk sekolah-sekolahdesa.⁸ Pendirian sekolah-sekolah yang dilakukan oleh pemerintah Belanda tersebut juga berlangsung di Ponorogo.Belanda masuk di Ponorogo tahun 1837.Setelah politik etis, pendirian sekolah di Ponorogo mulai tahun 1900.Pada tahun ini hanya ada Sekolah Desa yang berada di Patihan, Ponorogo.

Bersamaan dengan dibukanya sekolah-sekolah oleh pemerintah Belanda tersebut, pihak swasta asing maupun swasta pribumi juga ikut serta dalam

⁴Purwowijoyo, *Babad Ponorogo Jilid VII, Zaman Belanda*, (Ponorogo: Debdikbud, 1990),hlm. 39.

⁵*Ibid.*, hlm. 74.

⁶Ki Hadjar Dewantara, *Dari Kebangkitan Nasional Sampai Proklamasi Kemerdekaan*, (Djakarta: Endang, 1952),hlm. 74.

⁷Daliman, *op. cit.*, hlm. 72.

⁸Maftuh, “Kebijakan Politik Hindia Belanda dan Implikasinya Bagi Pendidikan Islam tahun 1900-1942”, *Tesis*, (Yogyakarta: UIN, 2009), hlm. 21.

penyelenggaraan pendidikan di Ponorogo. Organisasi pergerakan di daerah Ponorogo juga mulai mendirikan sekolah swasta.⁹ Organisasi pergerakan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) berusaha untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam yang sebanding dengan sekolah Belanda.

Sebelum pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah dengan sistem barat, di Ponorogo sudah ada sistem pendidikan tradisional atau pesantren. Pendirian pondok pesantren merupakan salah satu cara untuk menyebarkan agama Islam.¹⁰ Agama Islam sudah berlangsung lama di Ponorogo dan banyak dianut oleh masyarakat Ponorogo. Penyebaran agama Islam di Ponorogo pertama kali dilakukan oleh Raden Batara Katong dan Seloaji dari Demak serta dibantu oleh Ki Ageng Mirah dari Ponorogo. Bathoro Katong, Seloaji dan Ki Ageng Mirah membuka masjid dan surau-surau untuk mengajarkan agama Islam berdasarkan Al-Quran.¹¹ Masjid dan surau-surau inilah yang diperkirakan berkembang menjadi pondok pesantren. Ponorogo mempunyai puluhan pondok pesantren dan karena keberadaan pondok pesantren itulah Ponorogo mempunyai predikat sebagai kota santri.¹²

B. Awal Munculnya Pendidikan di Ponorogo

Pada masa kolonial Belanda, Ponorogo merupakan bagian wilayah pemerintahan Hindia Belanda yang dipimpin oleh seorang Bupati.¹³ Secara administratif Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi lima kawedanan (distrik) atau

⁹Purwowijoyo, *op. cit.*, hlm. 46.

¹⁰Suwarno, "Kekunaan Masjid Tegalsari Ponorogo, Jawa Timur", dalam *Patrawidya* (Vol. 8, No. 4, 2007), hlm. 769-770.

¹¹Purwowijoyo, *loc. cit.*

¹²Jusuf Harsono, Slamet Santoso, *Sosiologi Masyarakat Ponorogo*, (Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2013), hlm. 2.

¹³ Humas Pemda Dati II Ponorogo, *Mengenal Potensi dan Dinamika Ponorogo*, (Ponorogo: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo, 1994), hlm. 134.

pembantu bupati. Kelima distrik tersebut ialah distrik Ponorogo, distrik Sumoroto, distrik Jebeng, distrik Arjowinangun, dan distrik Pulung.¹⁴Masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut memiliki kehidupan yang beragam.

Keadaan masyarakat Ponorogo sekitar tahun 1920-an masih memprihatinkan. Kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik, dan keagamaan serba tidak menentu. Hal ini disebabkan karena tekanan dari pemerintah Belanda terhadap masyarakat. Keadaan tersebut menyebabkan masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Masyarakat Ponorogo sendiri memiliki karakteristik sederhana, lugu, berani, keras, jujur, dan religius,¹⁵ berani, keras, dan jujur yang dapat dilihat dari kehidupan Warok¹⁶ Ponorogo. Sikap berani Warok terlihat dalam pembelaan mereka terhadap masyarakat Ponorogo yang ditindas oleh pemerintah kolonial Belanda. Penindasan dilakukan dengan mengambil hasil pertanian, peternakan, dan hasil kerajinan masyarakat untuk kepentingan pemerintah Belanda. Masyarakat diharuskan menanam kopi dan tom (bahan untuk membuat) yang hasilnya harus dijual murah kepada kolonial Belanda.¹⁷

Kehidupan agama juga merupakan salah satu penyebab terselenggarakannya pendidikan Islam (pesantren) di Ponorogo. Jauh sebelum tahun 1900-an Islam sudah menjadi agama yang dianut oleh masyarakat Ponorogo. Meskipun demikian, penganut agama Budha masih tetap ada dengan jumlah yang tidak

¹⁴Mudjijono, Reog Ponorogo: Fungsi Perkembangan dan Sosialisasi, dalam *Jarahnitra*, (_____, No, 009, 1997), hlm. 81.

¹⁵Jusuf Harsono, Slamet Santoso, *op. cit.*, hlm. 2-3.

¹⁶Warok ialah seorang laki-laki dewasa yang dituakan atau guru tempat bertanya dan pahlawan lokal yang kharismatik. Warok memiliki ilmu, sakti, senang menolong, melindungi sesama, jujur, terbuka, dan memberi yang membutuhkan. Lihat Lihat Isni Herawati, Kesenian Reog Ponorogo: Peralatan dan Busana Reog, dalam *Patrawidya*, (Vol. II, No. 4, 2010), hlm. 875-877.

¹⁷ Soemarto, *Melihat Ponorogo Lebih Dekat*, (Yogyakarta: Apex Offset, 2011), hlm. 9.

begitu banyak.¹⁸Lembaga pendidikan Islam menjadiawal dari pendidikan di Ponorogo.¹⁹Pendidikan Islam tersebut disebut dengan pondok pesantren.Pondok pesantren di Ponorogo berawal dari pendirian masjid dan surau-surau serta santri yang dibawa oleh Raden Batara Katong, dan Seloaji dari Demak.²⁰

Beberapa pondok pesantren di Ponorogo yang sudah berdiri sebelum tahun 1900 ialah Pondok Pesantren Setono yang berdiri tahun 1600, Pondok Pesantren Coper, Pondok Pesantren Josari, Pondok Pesantren Nglawu, Pondok Pesantren Kradenan, dan Pondok Pesantren Gebang Tinatar di Tegalsari yang didirikan kurang lebih tahun 1710.²¹Sampai memasuki masa kolonial Belanda pondok pesantren di Ponorogo yang masih bertahan ialah pondok pesantren Gebang Tinatar di Tegalsari, dan Pondok Pesantren Josari di Jetis.

C. Pendidikan di Ponorogo Masa Hindia Belanda Tahun 1900-1942

Beberapa pondok pesantren yang terdapat di Ponorogo pada masa Hindia Belandaialah Pondok Pesantren Gebang Tinatar, Pondok Pesantren Gontor, Pondok Pesantren Josari,Pondok Pesantren Demangan, dan Pondok Pesantren Durisawo.²²

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda kegiatan sosial keagamaan dibiarkan berkembang namun tetap diawasi ketat oleh pemerintah.Pengawasan dilakukan karena pemerintah Belanda selalu merasa curiga terhadap

¹⁸Purwowijoyo, *op. cit.*, hlm.47.

¹⁹Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Agama Islam.Lihat. Haris Daryono, Ali Haji, *Dari Majapahit Menuju Pondok Pesantren*, (Yogyakarta: Bagaskara, 2006), hlm. 170.

²⁰Purwowijoyo, *op. cit.*, hlm. 46.

²¹Haris Daryono, Ali Haji, *Dari Majapahit Menuju Pondok Pesantren*, (Yogyakarta: Bagaskara, 2006), hlm. 195-195.

²²Van Altema, “Memori Residen Ponorogo (H. M Van Altema), dalam ANRI, *Memori Serah Jabatan1921-1930(Jawa Timur dan Tanah Kerajaan)*, (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1978), hlm. 360.

Islam. Keadaan ini menyebabkan kreativitas pribumi semakin terbatas,²³ wilayah jajahan semakin miskin sehingga sarana dan peralatan dilembaga pendidikan pesantren juga terbatas. Keadaan tersebut dapat dilihat dari proses belajar mengajar di pondok pesantren Gontor yang pernah menggunakan tikar dari daun kelapa, kegiatan pondok pada siang hari dilakukan di luar ruangan dan di bawah pepohonan, sedangkan kegiatan pondok pada malam hari yang hanya menggunakan pencahayaan dari lampu “batok”.²⁴

Pengawasan ketat oleh pemerintah Belanda terus dilakukan di Hindia Belanda pada umumnya dan di Ponorogo pada khususnya. Tahun 1882 pemerintah Belanda membentuk *Priesterraden* yang bertugas mengawasi pondok-pondok pesantren.²⁵ Tahun 1905 pemerintah Belanda membentuk Ordonasi Guru yang mewajibkan guru agama yang mengajar di pondok pesantren datang ke kantor pemerintah untuk mendaftarkan diri dan meminta izin pada pemerintah Belanda. Ordonasi Guru tahun 1905 diperbarui dengan Ordonasi tahun 1925. Ordonasi tersebut menyatakan bahwa guru agama tidak perlu izin mengajar tetapi harus memberitahukan aktivitas yang dilakukan pada Bupati.²⁶ Hal ini menyebabkan pesantren mengalami kerepotan dalam pengajarannya.²⁷

Contohnya di Ponorogo, proses pembelajaran di Pondok Pesantren Gontor diawasi oleh pemerintah Belanda. Pengawasan dilakukan dengan dibatasinya sarana dan peralatan di pondok pesantren Gontor. Pada awalnya pondok tidak

²³Abdul Munir Mulkhan, Ahmad Syafii Maarif, *1 Abad Muhammadiyah*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 15.

²⁴Abdullah Mahmud, *Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo 1926-1990*, (Ponorogo: Panitia Peringatan Delapan Windu Pondok Modern Darussalam Gontor, 1990), hlm. 15.

²⁵Heru, dkk, *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur*, (Surabaya: Depdikbud, 1986), hlm.

²⁶Joko Sayono, Perkembangan Pesantren di Jawa Timur, dalam *Bahasa dan Seni*, (Vol. 33, No. 1, 2005), hlm. 64.

²⁷Said, Junimar Affan, *Mendidik dari Zaman ke Zaman*, (Bandung: Jemmars, 1987), hlm. 88.

memiliki bangku, kursi, papan tulis, dan tidak lampu pencahayaan yang terang.²⁸Selain itu, pemerintah kolonial Belanda juga melarang Pondok Pesantren Gontor memberikan pengajaran bahasa asing terhadap masyarakat, seperti bahasa Inggris dan Arab.Hal itu dilakukan karena pemerintah Belanda tetap menginginkan umat Islam bodoh dan merasa rendah diri terhadap pemerintah.²⁹

Selain pendidikan Islam di pesantren, di Ponorogo juga terdapat pendidikan modern.Pendidikan modern merupakan sistem pendidikan barat yang diperkenalkan oleh pemerintah Belanda. Pendidikan barat diperkenalkan kepada penduduk pribumi sebagai upaya untuk mendapatkan tenaga kerja. Pendidikan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhanperusahaan-perusahaan.³⁰ Penyelenggaraan pendidikan yang diberikan pada pribumi tidak menyeluruh.Kesempatan pendidikan bagi pribumi hanya terbuka untuk pendidikan rendah.Kesempatan pendidikan diprioritaskan bagi kelompok elite pribumi.³¹

Penyelenggaraan pendidikan barat tersebut dibarengi dengan perluasan kristenisasi terhadap masyarakat pribumi.Pendidikan barat dan kristenisasi merupakan upaya pemerintah Belanda dalam menekan penduduk pribumi yang beragama Islam.³²Untuk menghindari perkembangan Islam, pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah.Sekolah-sekolah berdiri beriringan dengan pondok pesantren di Ponorogo. Meskipun awalnya pondok pesantren di Ponorogomendapat pengawasan ketat dari pemerintah kolonial Belanda, tapi akhirnya pondok pesantren di Ponorogo dapat menyesuaikan keadaan dengan kebijakan politik pendidikan Belanda.

²⁸Abdullah Mahmud, *op. cit.*, hlm. 15.

²⁹Ahmad Mansyur Surya Negara, *loc. cit.*

³⁰Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 18.

³¹Syariffudin, *dkk, 1 Abad Muhammadiyah*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010),hlm. 9.

³²*Ibid.*, hlm. 11.

Beberapa sekolah modern yang didirikan oleh pemerintah Belanda di Ponorogioialah Sekolah Desa (*Volks School*), Sekolah Kelas Satu (*Eerste Klasse School*) dan *Hollands Inlandse School* (HIS), Sekolah Kelas Dua (*Tweede Klasse School*), *Europese Lagere School* (ELS), Sekolah Sambungan (*Vervolg School*), dan *Hollands Chinese School* (HCS).

Pada masa Hindia Belanda, bersamaan dengan didirikannya pendidikan modern, pihak swasta di Ponorogo juga mendirikan lembaga pendidikan. Pendidikan swasta dibangun dengan tujuan agar pribumi maupun rakyat asing lainnya dapat mengenyam pendidikan setara dengan pendidikan modern milik pemerintah Belanda. Pribumi kemudian menciptakan bentuk sekolah sendiri. Sekolah pribumi tersebut tercipta dalam bentuk Sekolah Partikelir. Sekolah partikelir ialah sekolah swasta yang dicap oleh Belanda sebagai *Wilde Scholen* (sekolah liar).³³ Sekolah ini didirikan dengan menggunakan sistem pendidikan barat dengan tetap memberikan pelajaran kebangsaan dan kebudayaan sendiri.³⁴ Sekolah partikelir ini didirikan oleh pribumi dan dimasuki oleh anak-anak pribumi.³⁵

Tahun 1911 terdapat Sekolah partikelir netral di Badegan, Bungkal, Gandu, Sawo, Slahung dan Sekolah partikelir yang bersifat keagamaan di Ngulug.³⁶ Sekolah partikelir di Ponorogo diberi subsidi tahunan oleh pemerintah Belanda mulai tahun 1911-1920. Subsidi yang diberikan pada Sekolah Partikelir tersebut meliputi, subsidi kompensasi gaji staf guru, subsidi kontribusi staf guru, subsidi pemeliharaan rutin fasilitas dan penambahan fasilitas, dan subsidi pengawasan sekolah. Pemohon subsidi biasa dilakukan oleh kepala sekolah atau

³³Nasution, *op. cit.*, hlm.153.

³⁴Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 47.

³⁵*Ibid.*, hlm. 59.

³⁶*Algemeen Verslag van het Onderwijs in Nederlandsch Indie Loopende Over het Jaar 1911*, *op. cit.*, hlm. 88-89.

guru misionaris sekolah masing-masing. Jumlah pemberian subsidi pada tahun 1911-1920 berjumlah f 9.837,-³⁷

Sampai tahun 1930, sekolah partikelir tanpa subsidi di Ponorogo ialah 1 HIS, 1 Kursus Petang, 1 Sekolah Kartini dengan mata pelajaran bahasa Belanda, 1 Sekolah Agama Islam dan perkumpulan Islamiyah, 1 Sekolah Agama Islam dari perkumpulan Ingatulmuslimin, sekolah untuk anak pribumi dan Cina yang didirikan oleh seorang pensiunan Belanda di Badegan dan Sumoroto, sekolah khusus untuk anak Cina yang didirikan oleh perkumpulan Tan Liep Hwa di Desa Mangkujayan, sekolah *Frobel* (tanam kanak-kanak) yang berlokasi di distrik Pulung, dan sekolah Zending (dari agama Protestan) untuk golongan pribumi di desa Ngulug.³⁸

Selain itu, organisasi pergerakan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan di Ponorogo. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah Ponorogo ialah Madrasah Malam Hari, *Madrasah Islamiyah*, *Madrasah Met De Quran*, *Standaard School Muhammadiyah* dan *Standaard School Muhammadiyah Gesubsidieerde*, Taman Kanak-kanak Bustanul Athfal 'Aisyiyah, *Holland Inlandsch School Met De Qur'an* dan *Holland Inlandsch School Muhammadiyah*, *Schakel School Muhammadiyah*, Sekolah Kursus Guru, MULO Muhammadiyah, *Wusto Muallimin Muhammadiyah* (Pendidikan Islam Menengah) dan *Wustho Muballigin*. Sedangkan sekolah yang didirikan oleh NU Ponorogo pada masa Hindia Belanda ialah Sekolah Dasar (SD) Ma'arif, MI Ma'arif Al-Islamiyah Selorejo, MI Ma'arif Cekok, dan MI Ma'arif Patihan Wetan.

D. Dampak Pendidikan di Ponorogo Tahun 1900-1942

Ponorogo mempunyai beberapa pondok pesantren. Keberadaan pondok pesantren di Ponorogo menyebabkan Ponorogo mempunyai predikat sebagai kota

³⁷*Kolonial Verslag van 1912-1921.*

³⁸Van Altema, "Memori Residen Ponorogo (H. M Van Altema), dalam ANRI, *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Timur dan Tanah Kerajaan)*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1978, hlm. 359.

santri. Predikat ini mempengaruhi terbentuknya kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat Ponorogo. Kelompok sosial yang terbentuk ialah kelompok *santri*³⁹ dan *abangan*.⁴⁰

Predikat kota santri juga mempengaruhi terjadinya polarisasi⁴¹ sosial antara kedua kelompok tersebut. Hal ini disebabkan kedua kelompok tersebut mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan. Kebiasaan yang bertentangan tersebut dapat dilihat dari perilaku antara keduanya.⁴² Keadaan demikian dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat Ponorogo. Sebagian besar masyarakat Ponorogo yang beragama Islam tidak pernah mengunjungi rumah makan yang dikelola oleh orang Cina. Hal ini disebabkan karena masyarakat Ponorogo yang beragama Islam menghawatirkan masakan Cina yang khas dengan minyak babi. Minyak babi ialah suatu yang haram menurut agama Islam.⁴³

Berbeda dengan kelompok santri, kelompok abangan masih berorientasi desa dan mempraktekan Islam dengan cara yang khusus dan lokal.⁴⁴ Kelompok abangan menitik beratkan pada aspek animisme dan dinamisme Jawa.⁴⁵ Hal ini terlihat dari kehidupan masyarakat di Ponorogo pada tahun 1920-an. Pada tahun tersebut

³⁹Santri merupakan kelompok yang taat menjalankan rukun Islam (khususnya salat dan puasa) dan sangat memperhatikan penafsiran moral dan sosial dari doktrin Islam. Lihat Suhadi, *KawinLintas Agama*, (Yogyakarta: LKiS, 2006), hlm. xvi.

⁴⁰Abangan merupakan kelompok yang terbentuk akibat pertemuan Islam dan Hindhu-Budha. Abangan merupakan kelompok yang belum mematuhi ajaran Islam sepenuhnya dan lebih mementingkan aspek ritual dari keberagaman daripada mematuhi doktrin agama Islam. *Ibid.*

⁴¹Polarisasi ialah terbaginya dua kelompok yang saling berlawanan. Lihat. Damien Dematra, *Sejuta Doa Untuk Gusdur*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), hlm. 103.

⁴²Jusuf Harsono, Slamet Santoso, *op. cit.*, hlm. 2.

⁴³*Ibid.*, hlm. 49.

⁴⁴Suhadi, *loc. cit*

⁴⁵Aprinus Salam, *Oposisi Sastra Sufi*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 120.

tradisi dan nilai-nilai lama (kejawen) masih dilakukan oleh kelompok abangan di Ponorogo.⁴⁶

Sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan masyarakat Ponorogo saat itu masih memprihatinkan. Kehidupan agama Islam masih bercampur dengan kepercayaan animisme dan dinamisme.⁴⁷ Hal tersebut memperlihatkan bahwa kehidupan santri dan abangan di Ponorogo memang berbeda. Perbedaan antara santri dan abangan terlihat dalam perilaku religious keduanya.⁴⁸

Penyelenggaraan pendidikan di Ponorogoyang pada umumnya hanya untuk golongan elite, menyebabkan dampak semakin ketarannya sistem kelas sosial dalam masyarakat Ponorogo. Kelas sosial yang semakin tampak ialah kelas pejabat tinggi yang merupakan lulusan HIS dan kelas rendah pada umumnya atau kelas tidak terpelajar yang tidak mendapat pendidikan di HIS. Perbedaan tersebut disebabkan karena pada zaman pemerintahan kolonial Belanda golongan masyarakat Ponorogo dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas priyayi (pejabat negara) mulai pejabat rendah sampai pejabat tinggi yang terdiri atas bangsawan, priyai, birokrasi dan kaum intelektual. Kelas kedua yaitu kelas rendah yang terdiri dari petani, buruh dan pedagang.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, anak pejabat di Ponorogo tidak boleh kumpul satu sekolah maupun satu kelas dengan anak petani, buruh, dan pedagang. Anak pejabat dapat bersekolah di *Hollands Inlands School* (HIS). Sedangkan anak pribumi umumnya tidak dapat bersekolah di HIS karena mahal biaya sekolah. Golongan bangsawan adalah golongan masyarakat Ponorogo yang dapat mengenyam pendidikan di HIS. Biaya sekolah yang mahal menyebabkan golongan

⁴⁶Wibowo, *Penghormatan Leluhur dan Model-model Lain Untuk Menciptakan Solidaritas Masyarakat di Ponorogo Jawa Timur*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Pengkajian Sejarah dan Antropologi, 2002), hlm. 16.

⁴⁷Tim Penelitian & Penulisan Sejarah Muhammadiyah Ponorogo, *op. cit.*, hlm. 20-21.

⁴⁸Dwi Purwoko, "Hubungan Akses Media Konteks Membaca dengan Kemandirian Santri di Pondok Pesantren", dalam *Komunika*, (Vol 10, No. 1, 2007), hlm. 49.

kelas rendah dalam masyarakat Ponorogo tidak dapat mengenyam pendidikan di HIS. Sampai tahun 1942, lulusan HIS merupakan syarat untuk menjadi pejabat tinggi di Ponorogo. Lulusan HIS juga mengindikasikan kelas sosial dari golongan terpelajar menjadi naik. Pendidikan HIS inilah yang membedakan kelas sosial golongan terpelajar berbeda dengan golongan masyarakat pribumi rendah pada umumnya yang tidak mendapatkan pendidikan.

Pendidikan barat yang diperkenalkan kepada penduduk pribumi secara terbatas telah memunculkan kelompok intelektual⁴⁹ dan profesional yang mampu melakukan perubahan-perubahan, memunculkan ide-ide baru dalam masyarakat dan sikap perlawanan terhadap kekuasaan pemerintah kolonial. Untuk melakukan perubahan kelompok intelektual yang muncul tersebut membentuk suatu organisasi modern.⁵⁰ Organisasi modern yang dibentuk mendasari pergerakan mereka atas ikatan pertentangan kekuasaan politik dan ekonomi penjajah dan keinginan organisasi untuk menghapuskan sistem kolonial dan mencapai kemerdekaan. Organisasi pergerakan tersebut berorientasi pada pendidikan pribumi yang tidak terlalu diperhatikan, sikap pemerintah Belanda yang sering melukai pribumi, sikap pers dan sikap orang Belanda yang sering menipu pribumi.⁵¹

Organisasi modern di Ponorogo lebih mengutamakan Pendidikan Islam. Organisasi Islam di Ponorogo yang lebih dulu merintis pergerakan ini ialah organisasi Serikat Islam (SI). SI mulai ada di Ponorogo ketika pengusaha batik Ponorogo melakukan perdagangan dengan Serikat Dagang Islam (SDI) di Solotahun 1912. SI bergerak dalam memperjuangkan ekonomi rakyat dengan memberikan pelajaran menurut perintah agama Islam serta menghilangkan praktek-praktek yang disertai berbagai pemahaman yang keliru tentang agama

⁴⁹Sebagian besar dari kaum intelektual tersebut merupakan keturunan bangsawan. Lihat Nasution, *op. cit.*, hlm. 153.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 11-12.

⁵¹ Kamsil, C.S.T, Julianto, *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1993).

Islam.⁵²Serikat Islam juga bertujuan menghilangkan kepercayaan animisme dan dinamisme yang dahulu masih dianut oleh masyarakat Ponorogo. Hal ini disebabkan karena masyarakat Ponorogo pada saat itu memiliki pengetahuan yang minim tentang agama Islam.

Selain SI, organisasi modern yang ada di Ponorogo saat itu ialah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Organisasi tersebut juga bergerak dalam bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah. Pada masa kolonial Belanda NU tetap berjuang memajukan pesantren-pesantren dan madrasah-madrasah⁵³ meskipun pada saat itu pendidikan Islam diawasi ketat oleh pemerintah. Beberapa madrasah dan sekolah yang didirikan oleh NU Ponorogo pada masa Hindia Belanda ialah Sekolah Dasar (SD) Ma'arif, MI Ma'arif Al-Islamiah Selorejo, MI Ma'arif Cekok, MI Ma'arif Patihan Wetan.

Beberapa sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah Ponorogo pada saat itu ialah Madrasah Malam Hari, *Madrasah Islamiyah*, *Madrasah Met De Quran*, *Standaardschool Muhammadiyah* dan *Standaardschool Muhammadiyah Gesubsidieerde*, Taman Kanak-kanak Bustanul Athfal 'Aisyiyah, *Holland Inlandsch School Met De Qur'an* dan *Holland Inlandsch School Muhammadiyah*, *Schakelschool Muhammadiyah*, Sekolah Kursus Guru, MULO Muhammadiyah, *Wusto Muallimin Muhammadiyah* (Pendidikan Islam Menengah) dan *Wustho Muballigin*.

Pada kesimpulannya, organisasi pergerakan Islam seperti SI, Muhammadiyah dan NU ini berkeinginan agar masyarakat Ponorogo memiliki pengetahuan umum dan pendidikan berdasar agama Islam. Pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut bertujuan untuk menyipakan calon pegawai pemerintah dengan tetap memberikan pendidikan agama Islam, cinta tanah air, bahasa dan kebudayaan sendiri.⁵⁴ Pendidikan tersebut menyebabkan meningkatnya kecerdasan

⁵²Tim Penelitian & Penulisan Sejarah Muhammadiyah Ponorogo, hlm. 15.

⁵³Heru, dkk, *op. cit.*, hlm. 153-154.

⁵⁴Aqib Suminto, *op. cit.*, hlm. 47-48.

hidup masyarakat Ponorogo dan pelajaran agama Islam yang diberikan menyebabkan meningkatnya kereligiusan masyarakat Ponorogo.

E. Kesimpulan

Pendidikan di Ponorogo dimulai dari sistem pendidikan yang bersifat tradisional (pesantren). Beberapa pondok pesantren yang ada di Ponorogo pada masa Hindia Belanda ialah Pondok Pesantren Gebang Tinatar di Tegalsari, Pondok Pesantren Gontor di Mlarak, Pondok Pesantren Josari di Jetis, dan Pondok Pesantren Durisawo di Nologaten.

Saat Belanda datang di Ponorogo tahun 1837 pemerintah Belanda memberikan kontrol pada pesantren. Hal ini disebabkan pemerintah merasa takut terhadap Islam. Islam dianggap sebagai hal yang dapat menghancurkan kekuasaan pemerintah Belanda di Hindia Belanda dan pengambat penyebaran Kristen di daerah koloni. Untuk menyaingi eksistensi pesantren, pemerintah mulai menyelenggarakan pendidikan barat dengan mendirikan sekolah-sekolah di Hindia Belanda.

Penyelenggaraan pendidikan modern mulai berkembang di Ponorogo pada awal abad ke XX. Hal ini dapat dibuktikan dengan dibukanya sekolah dengan sistem barat di Ponorogo tahun 1900. Pendidikan di Ponorogo mulai berkembang setelah pemerintah mencanangkan program politik etis tahun 1901. Baru setelah adanya politik etis berbagai jenis sekolah modern mulai berkembang di Ponorogo. Selain Sekolah Desa, sekolah modern yang dibuka oleh pemerintah Belanda di Ponorogo ialah Sekolah Kelas Satu (*Eerste Klasse School*) yang diperuntukkan bagi golongan elite atau priyai, *Hollands Inlandse School* (HIS), Sekolah Kelas Dua (*Tweede Klasse School*) yang diperuntukkan bagi pribumi pada umumnya, Sekolah Sambungan (*Vervolg School*) yang merupakan sekolah sambungan dari lulusan Sekolah Desa, dan *Europeesche Lagere School* (ELS) yang merupakan sekolah untuk anak keturunan Belanda.

Bersamaan dengan dibukanya sekolah oleh pemerintah Belanda, pihak swasta seperti organisasi Islam di Ponorogo juga mendirikan sekolah dengan sistem pendidikan barat namun tetap memberikan pelajaran agama Islam dalam

kurikulum sekolah. Organisasi modern di Ponorogo yang mendirikan sekolah swasta pada saat itu ialah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Muhammadiyah dan NU mendirikan sekolah-sekolah yang berorientasi pada pendidikan barat dengan tetap memberikan pelajaran agama Islam dalam kurikulum sekolah.

Perkembangan pendidikan di Ponorogo tersebut menimbulkan beberapa dampak. Pendidikan pesantren di Ponorogo menimbulkan dampak seperti terbentuknya kelompok santri dan abangan, munculnya golongan elite modern (pejabat tinggi pemerintahan) dan kelas non-terpelajar, terbentuknya organisasi modern, serta meningkatnya kecerdasan dan kereligiusan masyarakat Ponorogo.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip :

Algemeen Verslag van het Onderwijs in Nederlandsch Indie Loopende Over het Jaar 1911.

ANRI, *Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Timur dan Tanah Kerajaan)*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1978.

Kolonial Verslag van 1912-1921.

Buku-buku dan artikel :

Abdul Munir Mul Khan, Ahmad Syafii Maarif, *1 Abad Muhammadiyah*, Jakarta: Kompas, 2010.

Abdullah Mahmud, *Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo 1926-1990*, (Ponorogo: Panitia Peringatan Delapan Windu Pondok Modern Darussalam Gontor, 1990.

Ahmad Mansyur Suryanegara, *Api Sejarah*, Bandung: Salamandani Pustaka Semesta, 2009.

Aprinus Salam, *Oposisi Sastra Sufi*, Yogyakarta: LKiS, 2004.

Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985.

Daliman, A, *Sejarah Hindia Belanda Abad XIX-Awal Abad XX*, Yogyakarta: Ombak, 2012.

- Damien Dematra, *Sejuta Doa Untuk Gusdur*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010.
- Dwi Purwoko, “Hubungan Akses Media Konteks Membaca dengan Kemandirian Santri di Pondok Pesantren”, dalam *Komunika*, (Vol 10, No. 1, 2007).
- Haris Daryono, Ali Haji, *Dari Majapahit Menuju Pondok Pesantren*, Yogyakarta: Bagaskara, 2006.
- Heru, dkk, *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur*, Surabaya: Depdikbud, 1986.
- Humas Pemda Dati II Ponorogo, *Mengenal Potensi dan Dinamika Ponorogo*, Ponorogo: Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo, 1994.
- Isni Herawati, Kesenian Reog Ponorogo: Peralatan dan Busana Reog, dalam *Patrawidya*, (Vol. II, No. 4, 2010).
- Joko Sayono, Perkembangan Pesantren di Jawa Timur, dalam *Bahasa dan Seni*, (Vol. 33, No. 1, 2005).
- Jusuf Harsono, Slamet Santoso, *Sosiologi Masyarakat Ponorogo*, (Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, ____).
- Maftuh, “Kebijakan Politik Hindia Belanda dan Implikasinya Bagi Pendidikan Islam tahun 1900-1942”, *Tesis*, Yogyakarta: UIN, 2009.
- Mudjijono, Reog Ponorogo: Fungsi Perkembangan dan Sosialisasi, dalam *Jarahnitra*, (_____, No, 009, 1997).
- Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Purwowijoyo, *Babad Ponorogo Jilid VII, Zaman Belanda*, Ponorogo: Debdikbud, 1990.
- Said, Junimar Affan, *Mendidik dari Zaman ke Zaman*, Bandung: Jemmars, 1987.
- Soemarto, *Melihat Ponorogo Lebih Dekat*, Yogyakarta: Apix Offset, 2011.
- Suhadi, *KawinLintas Agama*, Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Suwarno, “Kekunaan Masjid Tegalsari Ponorogo, Jawa Timur”, dalam *Patrawidya* (Vol. 8, No. 4, 2007).
- Syariffudin, dkk, *1 Abad Muhammadiyah*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Tim Penelitian & Penulisan Sejarah Muhammadiyah Ponorogo, *Selintas Perkembangan Muhammadiyah Ponorogo*, Ponorogo: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Pustaka Ponorogo, 1991.

Wibowo, *Penghormatan Leluhur dan Model-model Lain Untuk Menciptakan Solidaritas Masyarakat di Ponorogo Jawa Timur*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian Pengkajian Sejarah dan Antropologi, 2002.

Yogyakarta, 3 Juni 2016

Pembimbing



Ririn Darini, M.Hum
NIP. 19741118 199903 2 001

Reviewer



Danar Widiyanta, M.Hum
NIP. 19681010 19974031 001